

# KEBIJAKAN STRATEGIS PERPUSTAKAAN PADA MASA PANDEMI

Sungadi

sungadi@uui.ac.id

Pustakawan Universitas Islam Indonesia

## ABSTRAK

Masa pandemi covid 19 merambah hampir di seluruh belahan dunia telah berlangsung hampir 9 bulan dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda berakhir utamanya yang terjadi di Indonesia. Dampak dari wabah ini dapat mempengaruhi hampir di seluruh layanan publik, tidak terkecuali layanan perpustakaan. Pada masa pandemi covid 19 banyak perpustakaan yang melakukan penghentian layanan yang sifatnya kontak langsung dengan para pemustaka. Sementara pemenuhan kebutuhan informasi dan bahan bacaan serta layanan lainnya bagi pemustaka tetap perlu dilakukan, untuk itu perlu adanya langkah nyata dan kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh perpustakaan. Tulisan ini membahas tentang kebijakan perpustakaan pada masa pandemi antara lain meliputi: (1) kebijakan umum perpustakaan; (2) transaksi peminjaman; (3) layanan daring; (4) prinsip dan prioritas. Dari ke-4 *point* ini didapatkan hasil yang sangat mendasar, bahwa: (1) Perpustakaan buka seperti biasa, sebaiknya hanya layanan malam yang ditutup. (2) Memperpanjang tanggal jatuh tempo pada masa pandemi perlu diberlakukan. (3) Kebijakan pembaruan otomatis untuk menghilangkan denda keterlambatan pinjaman buku. (4) Layanan digital dan konten elektronik tersedia bagi pemustaka yang menggunakan perangkat internet. (5) Berbagi hotspot Wi-Fi sehingga pelanggan yang tidak memiliki layanan internet dapat terus menikmati penawaran digital perpustakaan. (6) Mengakomodasi kebutuhan pemustaka yang mungkin tidak memiliki akses internet, komputer di rumah, atau akses ke informasi.

Kata kunci: ***Kebijakan Perpustakaan; Masa Pandemi; Covid19***

## **PENDAHULUAN**

COVID-19, umumnya dikenal sebagai coronavirus yang melanda di hampir seluruh belahan dunia dampaknya dapat melumpuhkan aktivitas layanan publik, termasuk di dalam layanan perpustakaan. Turner dan Rosenblum (2020) dalam Freudenberger (2020) pada berbagai sudut pandang yang unik, setelah berada di garis depan COVID-19 ketika pandemi pertama kali menjadi perhatian nasional, dan telah memodelkan bagaimana perpustakaan dapat menangani krisis informasi pemustaka dengan tenang dan penuh kearifan. Pustakawan memiliki peran penting untuk memainkan perannya selama masa kelangkaan informasi dan penyebaran informasi yang sangat dibutuhkan oleh pemustaka. Pada saat yang sama para pemimpin perpustakaan membuat keputusan untuk meminimalkan kontak sosial dan menjaga keselamatan karyawan mereka. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa dampak dari covid 19 terhadap perpustakaan adalah terjadinya penutupan layanan perpustakaan kepada pemustaka yang bersifat kontak langsung secara fisik. Tujuan dari pengurangan kontak fisik langsung ini adalah dalam rangka untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi pustakawan maupun pemustaka, namun pada sisi lain perpustakaan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pemustaka. Dan tentu saja dalam hal menjaga kesehatan dan keselamatan seperti situasi yang sedang terjadi seperti sekarang, perpustakaan ingin menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan situasi di atas, maka perlu adanya langkah nyata dan keibjakan strategis bagi pemustaka, sehingga kebutuhan informasi dan sumber bacaan serta layanan lainnya

tetap dapat terpenuhi. Kebijakan strategis perpustakaan pada masa pandemi ini antara lain meliputi: (1) kebijakan umum perpustakaan; (2) transaksi peminjaman; (3) layanan daring; (4) prinsip dan prioritas.

## **PEMBAHASAN**

Menurut Kirchner (2020) dalam Freudenberger (2020) perpustakaan yang telah ditutup seharusnya mempromosikan sumber daya digital ke komunitas; meskipun tidak semua rumah memiliki akses ke internet. Hal ini perlu adanya langkah konkrit cobalah bekerja dengan penyedia telepon lokal Anda atau sponsor lain untuk menyediakan hot spot gratis / murah untuk pemustaka. Sementara United for Libraries menyarankan bahwa semua perpustakaan perlu memiliki kebijakan dengan kriteria yang jelas pada saat menutup perpustakaan, antara lain yang berkaitan dengan cuti sakit karyawan, penggajian, masalah perbankan dan keuangan, serta kapan dan bagaimana orang dapat bekerja dari rumah.

Perpustakaan juga merekomendasikan prosedur pendokumentasian atau memberikan pelatihan silang untuk memungkinkan kelanjutan operasi perpustakaan ketika orang tidak dapat datang untuk bekerja. United for Libraries juga mendukung adanya kebijakan: (1) Praktik menjaga jarak sosial (melepas kursi, membatasi jumlah orang yang berkunjung sekaligus, melepas rak mantel, dll.); (2) Kriteria untuk menunda program; (3) Metode pembersihan dan menentukan perbedaan antara pembersihan, disinfektan, dan sanitasi; (4) Menetapkan jadwal untuk memenuhi kebutuhan kritis fasilitas ketika ditutup untuk waktu yang lama; (5) Rencana untuk melanjutkan layanan dan untuk berkomunikasi dengan publik layanan apa yang masih tersedia; (6) Mengakomodasi kebutuhan

anggota masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses internet, komputer di rumah, atau akses ke informasi; (7) Anda harus flexible dan responsif, membuat beberapa keputusan dan mengambil tindakan tanpa memiliki semua informasi yang Anda inginkan,” kata Lomax (2020) dalam Freudenberger (2020). Menurut Kirchner (2020) dalam Freudenberger (2020) menjelaskan perpustakaan perlu menyediakan interaksi sosial? Pilihan apa yang akan dimiliki oleh pelanggan kita tanpa akses rumah ke internet agar tetap terhubung?”. Sementara Brown (2020) dalam Freudenberger (2020) menyatakan: (1) sebagian besar perpustakaan membebaskan biaya, memperpanjang tanggal jatuh tempo, dan menggunakan pembaruan otomatis untuk menghilangkan tekanan finansial; (2) Layanan digital dan konten elektronik tersedia bagi mereka yang menggunakan perangkat internet; (3) berbagi hotspot Wi-Fi sehingga pelanggan yang tidak memiliki layanan internet dapat terus menikmati penawaran digital perpustakaan; (4) Kotak pengembalian akan dikunci dan tidak menerima bahan sampai penutupan telah selesai; (5) Jika ada penutupan seluruh sistem yang diperpanjang, pemrograman jarak jauh akan dipertimbangkan.

### **1. Kebijakan Umum Perpustakaan**

Pada masa pandemi yang penting dilakukan oleh perpustakaan adalah perlu adanya kebijakan yang berpihak pada pengguna perpustakaan, sehingga kebutuhan layanan mereka tetap dapat diperoleh. Kebijakan umum ini meliputi berbagai langkah antara lain meliputi: (1) Perpustakaan yang telah ditutup seharusnya mempromosikan sumber daya digital ke pemustaka. Dengan mempromosikan sumber daya digital yang dipunya perpustakaan diharapkan para pemustaka dapat mengetahui sumber daya digital apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka pada masa

pandemi ini. (2) Praktik menjaga jarak sosial pada masa pandemi. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di perpustakaan saja, akan tetapi aturan ini berlaku pada hampir seluruh interaksi antar manusia pada seluruh aspek kehidupan, sehingga dapat diantisipasi terjadinya penularan virus covid 19. (3) Perlu kriteria dan skala prioritas untuk menunda program layanan. Skala prioritas layanan selama masa pandemi perlu mendapatkan porsi terbaik, mengingat kebutuhan informasi pemustaka tidak mungkin ditunda, misalnya layanan terkait dengan: peminjaman dan pengembalian koleksi, layanan bebas pustaka, cek plagiasi tugas akhir mahasiswa dan lain-lain. (4) Pembersihan, disinfektan, dan sanitasi secara berkala pada masa pandemi. Kebersihan secara fisik terhadap ruang perpustakaan dan lingkungan tidak kalah pentingnya dalam rangka mencegah dan meminimalisir penularan virus covid 19. (5) Menetapkan jadwal untuk memenuhi kebutuhan fasilitas urgen ketika perpustakaan ditutup untuk waktu yang lama. Pembuatan jadwal ini dirasa penting, mengingat kebutuhan layanan pemustaka yang tidak mungkin ditunda, meskipun layanan yang diberikan tentunya dalam skala terbatas. (6) Berkomunikasi dengan publik/pengguna perpustakaan tentang layanan apa yang masih tersedia, sehingga pemustaka mengetahui dengan pasti tentang apa saja yang dapat mereka peroleh terkait dengan layanan yang tersedia di perpustakaan. (7) Perpustakaan flexible dan responsif, membuat beberapa keputusan dan mengambil tindakan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki perpustakaan sehingga informasi yang diinginkan oleh pemustaka dapat dipenuhi. (8) Pilihan layanan apa saja yang akan dilakukan terhadap pemustaka agar mereka dapat melakukan akses dari rumah ke internet sehingga tetap terhubung. (9) Layanan peminjaman dan pengembalian akan ditutup dan tidak

menerima bahan sampai penutupan selesai. Kebijakan nomor 9 ini sebenarnya tidak perlu dilakukan secara total, tetapi layanan peminjaman dan pengembalian buku (bahan bacaan) tetap dapat dilakukan. Cara ini dapat dilakukan dengan sistem menggunakan jasa layanan *gosen* atau menggunakan jasa pengiriman paket bagi pemustaka yang berada di luar kota. (10) Jika ada penutupan seluruh sistem yang diperpanjang, pemrograman jarak jauh akan dipertimbangkan. Hal ini terkait dengan kebijakan pada nomor 9. Selain dari pada itu, kebijakan yang dapat dilakukan oleh perpustakaan adalah dengan memberlakukan layanan online, utamanya layanan *e-books*. Tentunya hal ini akan dapat terealisasi apabila koleksi *e-books* perpustakaan memadai.

## **2. Kebijakan Transaksi Peminjaman**

Kebijakan transaksi peminjaman tentunya memiliki peran yang penting sehingga pemustaka tetap terjaga atas kebutuhan informasinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah meliputi: (1) Perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi layanan anggota. Meskipun dalam skala terbatas, layanan terhadap pemustaka tetap perlu dilakukan. Penangguhan layanan langsung dan hilangnya akses ke koleksi fisik di jaringan perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta telah membuat lebih dari 29.000 mahasiswa, staf, dan sivitas akademika hanya memiliki dukungan perpustakaan jarak jauh yang tersedia untuk penelitian mereka. Memanfaatkan dan memperluas layanan online dan koleksi digital yang ada, serta memperoleh atau membangun alat penelitian baru untuk digunakan oleh para pemustaka, adalah dua pendekatan yang perlu diambil staf Perpustakaan UII sejak pandemi COVID-19 mengubah operasi perpustakaan. (2) Kegiatan perpustakaan–layanan online, meeting online dan layanan luring dengan – protokol. Pada masa

pandemi ini banyak hal yang dapat dilakukan oleh perpustakaan UII. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan pada skala waktu dan materi yang lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya pada kondisi normal adalah kegiatan layanan online pengenalan perpustakaan. Pada masa pandemi ini, pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru dapat dilakukan dalam durasi waktu antara 60-90 menit, dimana pada waktu normal hanya diberikan waktu sekitar 30 menit.

(3) Perpustakaan buka seperti biasa, sebaiknya hanya layanan malam yang ditutup. Dari hasil survei (Sungadi, 2020) yang dilakukan pada 3 PTS di DIY (UII, UMY dan UAD), dengan mengambil sampel sebanyak 386 mahasiswa, kebijakan ini oleh responden memberikan tanggapan sangat setuju sebanyak 220 orang (57%), menyatakan setuju sebanyak 155 orang (40,2% dan menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang (2,8%). Atas dasar data survei ini, maka kebijakan melakukan penutupan layanan perpustakaan secara total sebagian besar mahasiswa di PTS tersebut menyatakan tidak setuju.

(4) Memperpanjang tanggal jatuh tempo pada masa pandemi perlu diberlakukan. Dari hasil survei (Sungadi, 2020) yang dilakukan pada 3 PTS di DIY (UII, UMY dan UAD), dengan mengambil sampel sebanyak 386 mahasiswa, kebijakan ini oleh responden memberikan tanggapan sangat setuju sebanyak 226 orang (58,5%), menyatakan setuju sebanyak 153 orang (39,6% dan menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang (1,8%). Atas dasar data survei ini, maka kebijakan memperpanjang tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman oleh sebagian besar mahasiswa di PTS tersebut menyatakan sangat setuju.

(5) Menggunakan pembaruan otomatis untuk menghilangkan denda keterlambatan pinjaman buku. Hasil survei Sungadi (2020) membuktikan, bahwa kebijakan ini para responden menyatakan tidak setuju sebesar 6 orang (1,6%),

menyatakan setuju sebesar 172 orang (44,6%) dan menyatakan sangat setuju 208 orang (53,9%).

### **3. Kebijakan Layanan Online (Daring)**

Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, layanan daring merupakan suatu langkah nyata dan program andalan bagi perpustakaan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan upaya mengatasi krisis informasi bagi pemustaka. Pandemi COVID-19 tiba-tiba menutup perpustakaan perguruan tinggi hampir di seluruh belahan dunia sejak bulan Maret 2020, membuat staf perpustakaan berlomba untuk melanjutkan layanan perpustakaan. Selama berbulan-bulan, perpustakaan perguruan tinggi telah menyediakan sejumlah referensi, pengiriman dokumen, dan sumber bacaan penting lainnya untuk membantu fungsi fakultas dan mahasiswa selama sisa semester. Karena induk perpustakaan perguruan tinggi telah mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali, institusi akademik sekarang sedang menunggu semester pada musim perkuliahan dan mempertimbangkan bagaimana mereka dapat membuka fasilitas mereka sendiri dengan aman.

Proses pembukaan kembali masih dalam tahap yang sangat awal, karena informasi tentang pandemi berubah dari hari ke hari. Perintah dari pemerintah pusat dan daerah akan menginformasikan setiap langkah menuju pembukaan kembali, dan perpustakaan juga tunduk pada kebijakan administrasi institusi akademik induknya. Beberapa institusi perguruan tinggi, misalnya, berencana untuk membuka layanan pada semester langsung, sementara yang lain sedang mengembangkan instruksi hybrid online / in-person, dan yang lain berencana untuk tetap sepenuhnya melakukan layanan online.



“Kami perlu mengambil isyarat dari universitas secara keseluruhan,” kata Emily Clasper dalam Dixon (2020), direktur strategi layanan di Perpustakaan Kampus River University of Rochester. “Ketika ada OK di tingkat negara bagian dan di tingkat kota, bahwa kami dapat membuka kembali sesuatu, kami harus mengikuti apa yang dikatakan universitas OK.” Pada tahap perencanaan ini, kata Clasper, semua keputusan adalah “semacam tebakan cerdas” mengenai apa yang akan diizinkan dan diprioritaskan oleh lembaga yang lebih luas. Dengan demikian kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian bagi perpustakaan adalah hal-hal antara lain: (1) Layanan digital dan konten elektronik tersedia bagi pemustaka yang menggunakan perangkat internet. (2) Berbagi hotspot Wi-Fi sehingga pelanggan yang tidak memiliki layanan internet dapat terus menikmati penawaran digital perpustakaan. (3) Mengakomodasi kebutuhan pemustaka yang mungkin tidak memiliki akses internet, komputer di rumah, atau akses ke informasi.

#### **4. Prinsip dan Prioritas**

Untuk beberapa perpustakaan universitas, telah membentuk rencana pembukaan kembali, dengan tetap menjaga protokol kesehatan demi terjaganya keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang fakultas, mahasiswa, dan staf perpustakaan sebagai prioritas utama. Hal ini menuntut kehati-hatian di setiap langkah, dan pengakuan bahwa meskipun perpustakaan dibuka kembali dan mahasiswa kembali ke kampus, tidak ada yang akan menjadi interaksi seperti biasa. Dixon (2020) menulis bahwa Lauren Slingluff, dekan untuk Perpustakaan UConn, mengatakan bahwa banyak pustakawan “merasa perlu untuk membenarkan keberadaan mereka dengan menjadi penolong. Kami terbiasa

menjadi profesi yang langsung bekerja saat ada keadaan darurat.” Ia mengatakan, penting untuk “membuat orang memahami, bahwa jika kita tidak dapat memberikan layanan dengan aman, kita tidak dapat memberikan layanan itu. Kita tidak dapat mengkompromikan keselamatan dan kesejahteraan agar orang bisa mendapatkan buku.” Pernyataan Lauren ini dapat dimaknai bahwa pada masa pandemi perlakuan layanan pemustaka tidak dapat dilakukan seperti pada masa sebelum pandemi. Perlakuan layanan yang diberikan saat ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian terkait dengan protokol kesehatan.

Sebagai pusat utama kehidupan sosial dan intelektual di kampus universitas, perpustakaan menghadapi tantangan pembukaan kembali yang unik. Pimpinan perpustakaan perlu menentukan sejauh mana jika memang ada, perpustakaan bisa tetap menjadi pusat kehidupan kampus dengan aman. Menurut Matthew Shaw dalam Dixon (2020), dekan Perpustakaan Universitas di Ball State University (BSU) di Indiana, tempat beberapa kegiatan kampus telah dibuka kembali pada bulan Juli, “kolaboratif ruang dan teknologi adalah ciri khas dari pengalaman pengguna di Perpustakaan Universitas, dan salah satu yang utama tantangannya adalah menata ulang penggunaan dan akses dalam konteks protokol baru untuk jarak sosial, sanitasi, dan keselamatan.”

Clasper (2020) mengatakan bahwa ketika ruang perpustakaan dibuka kembali di University of Rochester, itu tidak akan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. “Kami akan membuka ruang demi ruang,” katanya, dan mencatat bahwa perpustakaan sedang mempertimbangkan opsi untuk menghapus furnitur dan sebaliknya menata ulang ruang untuk mempromosikan jarak sosial dan mencegah berkumpul.

Banyak perpustakaan universitas yang berencana untuk mengurangi jam perpustakaan, terkadang karena berkurangnya sumber daya staf karena cuti atau ketidakmampuan untuk mempekerjakan pekerja mahasiswa. Perpustakaan juga mengembangkan ide untuk membatasi jumlah orang di perpustakaan pada waktu tertentu, termasuk sistem reservasi untuk tempat duduk, dan memindahkan kursi atau ruang penutup seperti ruang belajar dan laboratorium komputer. Di UConn, rencana untuk membuka kembali ruang fisik berarti membuka layanan dengan kontak rendah atau tanpa kontak yang tidak dapat didigitalkan, seperti meminjamkan buku cetak melalui penjemputan di luar ruang perpustakaan dan bukan untuk berkumpul atau belajar kelompok. Meskipun, kita mengakui bahwa "perpustakaan pada dasarnya adalah tempat berkumpul, kita tidak yakin, walaupun hal itu adalah sesuatu yang akan dapat kita sediakan di musim perkuliahan.

## **PENUTUP**

Kebijakan strategis perpustakaan pada masa pandemi secara garis besar meliputi 4 kebijakan antara lain meliputi: (1) kebijakan umum perpustakaan; (2) transaksi peminjaman; (3) layanan daring; (4) prinsip dan prioritas. Atas dasar hasil survei, dari ke-4 point ini didapatkan hasil yang sangat mendasar, bahwa: (1) Perpustakaan buka seperti biasa, sebaiknya hanya layanan malam yang ditutup. (2) Memperpanjang tanggal jatuh tempo pada masa pandemi perlu diberlakukan. (3) Kebijakan pembaruan otomatis untuk menghilangkan denda keterlambatan pinjaman buku. (4) Layanan digital dan konten elektronik tersedia bagi pemustaka yang menggunakan perangkat internet. (5) Berbagi hotspot Wi-Fi sehingga pelanggan yang tidak memiliki layanan internet dapat terus

menikmati penawaran digital perpustakaan. (6) Mengakomodasi kebutuhan pemustaka yang mungkin tidak memiliki akses internet, komputer di rumah, atau akses ke informasi. (7) Pimpinan perpustakaan perlu menentukan, bahwa perpustakaan bisa tetap menjadi pusat kehidupan kampus dengan aman bagi seluruh komunitas yang ada.

### REFERENSI

- Dixon, Jennifer A. 2020. *Library Journal*, July 2020. 03630277, Vol. 145, Issue 7
- Freudenberger, Erica. 2020. As the threat of COVID-19 expands, public libraries balance patron needs with staff safety and containment. *Library Journal*; Apr2020, Vol. 145 Issue 4, p24-27.
- Sungadi. 2020. Pengaruh Masa Pandemi dan Kualitas Layanan Perpustakaan terhadap Loyalitas Mahasiswa Melalui Mediasi Kepuasan Pemustaka. *Laporan Penelitian Kajian Bidang Kepustakawanan Lingkup Nasional Berbasis Kompetisi Tahun 2020*.